



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALFI ASBEN,
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 904450

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 826.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187.5 m²/101 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/90 m² di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 251.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 213.850.000

1. MOTOR, YAMAHA STL MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.350.000
2. MOTOR, HONDA 35DT02K29MZ M/T/ CB 150 VERZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BT2WAT / FINO GRANDE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX MT / TERIOS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.2 X AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 147.650.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 633.511.924**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.821.261.924**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.821.261.924



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.